ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa fenomena yang terjadi di lingkungan pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi dimana banyaknya terjadi pelanggaran terhadap disiplin hari dan jam kerja. Hukuman sanksi administrasi yang diberikan nyatanya tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sementara itu, hukuman administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 116 Tahun 2018 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2018 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran disiplin dan apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran disiplin pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dan alat pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen dimana data yang diperoleh dari bahan pustaka serta literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum administrasi PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi belum maksimal karena beberapa pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin absensi tidak ditindak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021. Dalam hal pengawasan preventif dan represif sudah dilakukan. Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya ketidakdisiplinan yaitu banyaknya pegawai yang berasal dari daerah luar Kabupaten Muaro Jambi sehingga banyak pegawai yang terlambat, kurangnya monitoring (pengawasan) masing-masing Kepala Bagian kepada staffnya terutama yang melanggar disiplin, kecilnya jumlah tunjangan (TPP) serta sering terlambatnya pencairan TPP di Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, tidak ada *reward* atau penghargaan berupa tambahan penghasilan bagi pegawai yang lembur atau berprestasi karena selama ini *reward* yang diberikan hanya berupa piagam penghargaan dan sistem aplikasi absensi online (SIKO) Muaro Jambi yang tidak bisa digunakan sehingga OPD melakukan absen melalui *finger print* maupun absen manual (tanda tangan di form absensi).

Kata Kunci: Disiplin, Penegakan, Pelanggaran, Pegawai Negeri Sipil, Hukum

Administrasi